



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMAH NUR HAYATI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 224510

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/21 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m2/144 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah Seluas 289 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 1.389 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 335.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, HONDA WPNP/JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BBH-AI A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 173.941.983



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 4.108.941.983

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.108.941.983

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.